

Kinerja Pengelolaan Dana Desa: Dampak Partisipasi, Evaluasi Anggaran, dan Kejelasan Tujuan

Anastasia Wea¹, Sari Rahmadhani^{2*}

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Indonesia
Weaanastasia394@gmail.com, sari@stietotalwin.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 17 Februari 2025

Disetujui : 22 Maret 2025

Dipublikasi : 6 April 2025

ABSTRACT

Effective and transparent management of village funds is an important factor in improving the performance of village apparatus and ensuring targeted budget allocation. However, challenges such as low community participation, less optimal budget evaluation, and unclear budget goals are still obstacles to managing village funds. This study seeks to examine the impact of budget participation, budget evaluation, and budget objective clarity on the performance of the village fund management apparatus in Aesesa District, Nagekeo Regency, NTT. This study employs a quantitative approach using a survey method, distributing questionnaires to 103 respondents who are part of the village fund management apparatus. Data analysis uses multiple linear regression. The study results indicate that budget participation, budget evaluation, and budget objective clarity have a positive and significant impact on the performance of the village fund management apparatus. Greater community participation in the budgeting process enhances the transparency and accountability of village fund management. Budget evaluations carried out systematically can increase the effectiveness of budget use and minimize potential deviations. Meanwhile, the clarity of budget goals makes it easier for the apparatus to achieve the established goals, their performance must be optimized. This study concludes that enhancing budget participation, budget evaluation, and budget objective clarity can directly develop the performance of the apparatus in managing village funds. These findings contribute to village governments in improving financial governance that is more transparent, accountable, and oriented towards community welfare.

Keywords: *Accountability; Budget; Evaluation; Participation; Objective Clarity; Transparency.*

PENDAHULUAN

Insiden korupsi di Indonesia telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, menyebabkan kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat (Siti Solehah et al., 2023). Tindakan kecurangan yang terjadi merupakan pelanggaran yang tidak hanya menurunkan kepercayaan tetapi juga menguntungkan pelakunya, salah satunya melalui praktik korupsi (Layli & Arifin, 2020). Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat atau daerah, tetapi juga semakin marak di pemerintahan desa. Meningkatnya pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk diturunkan ke pemerintah desa, justru memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran. Jika sebelumnya kasus korupsi lebih banyak ditemukan di tingkat kabupaten atau kota, kini tren tersebut telah bergeser. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 51,61 persen kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum terjadi di pemerintahan desa (Safrina, 2025).

Masalah kinerja aparatur desa merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Beberapa faktor utama yang menjadi akar permasalahan meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, pengelolaan dana desa sering kali tidak transparan dan kurang akuntabel, membuka peluang bagi praktik korupsi dan penyelewengan. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat desa. Peningkatan kinerja aparatur desa harus dilakukan

secara sistematis melalui berbagai strategi. Pertama, kapasitas aparatur desa harus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, sistem pengawasan dan akuntabilitas perlu diperketat, baik melalui mekanisme internal maupun pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen. Ketiga, pengelolaan dana desa melalui partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan dana desa diharapkan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan desa.

Kasus di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT menjadi salah satu contoh nyata bagaimana lemahnya transparansi dalam mengelola dana desa dapat merugikan masyarakat. Warga desa meminta KPK untuk menyelidiki dugaan praktik mafia dalam proyek pembangunan waduk desa. Dugaan tersebut berkaitan dengan penerimaan ganti rugi lahan yang diduga dilakukan secara ganda dan tidak sesuai dengan data kepemilikan yang sah. Akibatnya, dana yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran, menyebabkan ketidakjelasan dalam alokasi anggaran serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek (Arkadius, 2024). Kasus tersebut menggambarkan bahwa kinerja dalam mengelola dana desa oleh aparatur desa masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pada semua aparat pengelola anggaran dana di desa menjadi suatu keharusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, serta kejelasan tujuan anggaran.

Meskipun banyak penelitian telah menganalisis hubungan antara partisipasi dalam menyusun anggaran, mengevaluasi anggaran, serta kejelasan tujuan penggunaan anggaran memengaruhi kinerja aparatur dalam mengelola dana desa, masih perlu diujikan terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai indikator dari faktor yang memengaruhi hubungan tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran masyarakat dapat meningkatkan motivasi kerja aparatur desa (Wuriasih et al., 2022 ; Oki et al., 2024). Selain itu, evaluasi anggaran yang dilakukan secara berkala dapat menekan potensi penyimpangan serta meningkatkan kinerja aparatur desa. Namun, penelitian lain justru menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian (Ronal, 2023 ; Aprilia & Fitria, 2020 ; Murtin & Rahmawati, 2023) menemukan kinerja aparatur desa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh partisipasi anggaran maupun evaluasi anggaran. Perbedaan ini menunjukkan perlu penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual yang menguji kinerja aparatur untuk diterapkan di kecamatan Aesesa dalam mengelola dana desanya.

Penelitian ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa, terutama terkait pengelolaan dana desa yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Meskipun regulasi telah ditetapkan, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran desa. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan masih menjadi tantangan besar, mengingat sebagian besar dari mereka belum memiliki kompetensi yang memadai. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kerangka kerja yang lebih relevan untuk pengelolaan keuangan desa. Hasil pembahasan riset ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan menjadi efektif guna mendorong aparatur mengelola dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah desa terutama di kabupaten Nagekeo, NTT dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di wilayahnya, yang dapat berdampak positif pada pembangunan kabupaten di NTT dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan manfaat konkret dalam perbaikan tata kelola keuangan yang diterapkan di desa se-Indonesia.

STUDI LITERATUR

Stewardship Theory

Penelitian ini mengadopsi teori penatalayanan yang menjelaskan bahwa para *steward* (pengelola) tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan kepentingan prinsipal (pemilik) (Ali et al., 2024). *Stewardship theory* berasumsi bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Teori ini juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan, serta penggunaan kekuasaan yang tepat, sehingga secara otomatis tujuan individu dapat tercapai sejalan dengan tujuan organisasi. Para *steward* meyakini bahwa kepentingan mereka selaras dengan kepentingan organisasi dan prinsipal. Dalam konteks pengelolaan dana desa, menurut Ika et al. (2019), teori ini memosisikan pemerintah sebagai penatalayanan dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hal ini, aparatur pemerintah yang berada di desa bertindak sebagai pengelola yang menjalankan amanahnya untuk mengelola anggaran demi kepentingan bersama (Ali et al., 2024).

Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa

Kinerja serta pengetahuan aparatur dalam mengelola dana desa dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam aspek akuntansi, dapat dievaluasi melalui tingkat tanggung jawab dan kompetensi yang dimiliki (Paji & Herdi, 2023). Kompetensi yang dimaksud mencakup pemahaman terhadap regulasi keuangan, kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, serta ketepatan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja aparatur pemerintah sendiri mencerminkan sejauh mana Kemampuan untuk secara efektif dan efisien memenuhi kewajiban dan tanggung jawab (Tome et al., 2023). Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam pengelolaan dana desa, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, transparansi keuangan, serta optimalisasi program pembangunan. Lebih lanjut, kinerja pemerintah juga berkaitan erat dengan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam konteks anggaran dana desa, yang mencakup perencanaan, pengalokasian, hingga evaluasi penggunaan dana tersebut (Anton et al., 2023). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada profesionalisme, akuntabilitas, dan dedikasi aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Partisipasi Anggaran Dana Desa

Partisipasi masyarakat turut serta mengelola dana di desa berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas membangun akuntabilitas di desa. Keturut sertaan ini melibatkan dalam proses penentuan keputusan, penyusunan, serta evaluasi anggaran, yang dilakukan langsung ataupun melalui lembaga perwakilan (Ronal, 2023). Menurut Andirfa et al., (2023) semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan program pembangunan desa. Partisipasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial agar penggunaan dana desa lebih transparan dan akuntabel (Sulistyowati & Nataliawati, 2022). Selain itu, partisipasi memperkuat kemitraan antara pemerintah desa dan warga serta meningkatkan tanggung jawab kolektif (Christina, 2021). Dengan keterlibatan aktif masyarakat, potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan, sehingga pembangunan lebih efektif. Oleh karena itu, membangun budaya partisipatif tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dikelola di desa benar-benar digunakan untuk memakmurkan masyarakat.

Evaluasi Anggaran Dana Desa

Evaluasi anggaran merupakan proses perbandingan antara budget yang telah disusun dan realisasi pelaksanaan, sehingga dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan yang terjadi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menilai kinerja aparatur pengelola dana desa (Firdausi, 2020). Menurut Christina, (2021) evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh pihak yang lebih berwenang atau memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai anggaran terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih rendah, baik dari segi jabatan maupun kemampuan. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi membantu meningkatkan akuntabilitas

serta mencegah pelanggaran dalam mengelola dana desa. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat terus ditingkatkan. Oleh karena itu, evaluasi anggaran sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

Kejelasan Tujuan Anggaran Dana Desa

Kejelasan dalam menetapkan sasaran anggaran menunjukkan seberapa mampu tujuan anggaran dapat diterapkan secara khusus sehingga mampu dipahami oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaannya. Penganggaran dana desa yang dirancang dengan jelas dan disertai pengeluaran yang transparan akan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaannya (Ronald, 2023). Jika anggaran yang ditetapkan belum memiliki visi yang jelas, berbagai permasalahan dapat muncul, sehingga diperlukan kejelasan agar anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Annisa, 2024). Kejelasan ini juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan desa. Selain itu, sasaran anggaran yang terdefinisi dengan baik akan memudahkan aparatur desa dalam mengelola serta mengevaluasi penggunaan dana secara lebih efektif. Dengan demikian, anggaran yang transparan dan terarah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kejelasan anggaran menjadi faktor utama dalam penciptaan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan efektif.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa

Partisipasi anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana desa, karena mencerminkan aspirasi masyarakat dalam proses penganggaran (Mutia, 2019). Dalam perspektif teori stewardship, masyarakat sebagai prinsipal menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga keterlibatan mereka dapat berfungsi sebagai arahan bagi aparatur dalam mengelola dana desa dengan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, masyarakat punya hak menilai, melakukan evaluasi, dan mengawasi penggunaan semua dana desa untuk memastikan pengelolaannya berjalan tertib. Oleh karena itu, Ketika sebuah desa berhasil menerapkan asas partisipasi masyarakat secara optimal, maka kinerja aparatur dalam pengelolaan dana desa juga cenderung lebih optimal (Pebriyanto & Sumadi, 2021). Partisipasi dalam penyusunan anggaran berdampak signifikan terhadap kinerja aparat pengelola dana desa, dimana tingginya tingkat partisipasi, dapat memperkuat dampaknya terhadap kinerja aparatur (Aghata et al., 2021). Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan dana di desanya memungkinkan pemerintah memperoleh masukan, penilaian, dan pengawasan yang lebih baik, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan prioritas pembangunan desa (Putri & Maryono, 2022). Partisipasi masyarakat yang tinggi, semakin terkontrol pula kinerja aparatur pengelola dana desa dalam meminimalisir potensi penyimpangan (Rasmini & Mimba, 2021).

Tingkat partisipasi yang tinggi terkait dengan meningkatnya motivasi aparatur, karena merasa disertakan dalam pengambilan keputusan anggaran, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas, inovasi, dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa (Oki et al., 2024). Partisipasi anggaran juga mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, karena masyarakat turut terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga risiko penyelewengan dapat diminimalkan (Andirfa et al., 2023). Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi anggaran, keputusan yang diambil oleh aparatur desa lebih akuntabel dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Saputra et al., 2024). Tingkat partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi, dapat memperbaiki pula kinerja aparatur dalam mengelola dana desa, karena mekanisme pengawasan dan keterlibatan publik mencegah terjadinya penyalahgunaan dana (Anggraeni & Yuliani, 2020). Partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dengan kinerja aparatur pengelola dana di desa, karena memperbanyak individu yang terlibat, dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam mengelola dana di desa (Masruhin & Kaukab, 2019).

H₁ Partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja aparatur pengelolaan dana di desa.

Dampak Evaluasi Anggaran pada Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa.

Evaluasi anggaran diterapkan untuk meninjau hasil penggunaan anggaran yang telah dikelola oleh aparatur pemerintah serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di masa mendatang. Berdasarkan teori *stewardship*, aparatur pengelola dana desa sebagai *steward* bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi anggaran secara optimal agar dapat dijadikan patokan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Evaluasi anggaran juga merupakan bentuk tanggung jawab aparatur dalam memberikan kepuasan kepada prinsipal, yakni masyarakat. Evaluasi yang baik memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana realisasi anggaran telah memenuhi target yang ditetapkan (Ega & Rahmadhani, 2024). Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif dan berhasil mencapai tujuan, maka kinerja aparatur pengelola dana desa dapat dinilai baik. Sebaliknya, jika anggaran tidak digunakan secara optimal atau target tidak tercapai, maka hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam kinerja aparatur pengelola dana desa (Rizki Wijaya et al., 2024).

Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur, di mana semakin baik tingkat evaluasi, semakin tinggi pula keberhasilan kinerja aparatur (Kusuma et al., 2021). Selain itu, evaluasi anggaran yang dilakukan dengan baik juga memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta mendorong perilaku aparatur untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Christina, 2021). Evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan memungkinkan aparatur desa untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan, melakukan perbaikan strategi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar kinerja mereka semakin optimal (Andirfa et al., 2023). Evaluasi anggaran juga menjadi langkah lanjutan setelah perencanaan anggaran terlaksana, berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya (Stienu & Gresik, 2020). Jika dilakukan secara teratur, evaluasi anggaran dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengendalikan dan meningkatkan kinerja aparatur pengelola dana desa (Rizki Wijaya et al., 2024). Dengan demikian, kinerja aparatur tidak hanya dinilai dari motivasi dan kompetensi dalam menyelesaikan suatu program, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya (Christina, 2021).

H₂ Evaluasi anggaran berdampak positif pada kinerja aparatur dalam mengelola dana desa.

Dampak Kejelasan Tujuan Anggaran pada Kinerja Aparatur Pengelolaan Dana Desa.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pengaturan dana desa yang baik dan sesuai dengan sasaran anggaran sangat bergantung pada kinerja aparatur pemerintah. Untuk mencapai kinerja optimal dan memastikan akuntabilitas, sumber daya harus dikelola secara efektif, efisien, hemat, adil dan merata melalui susunan mata anggaran yang ditetapkan secara jelas. Kejelasan tujuan anggaran berperan penting dalam membantu aparatur pengelola dana desa meningkatkan kinerja dan mencapai keberhasilan sesuai pada sasaran yang sudah ditetapkan. Hal ini memperjelas tujuan yang ditetapkan dalam anggaran, semakin baik pula dana desa dikelola dalam meningkatkan kinerja aparatur (Ali et al., 2024). Kejelasan tujuan anggaran juga mendukung realisasi anggaran secara lebih efektif, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja aparatur. Setiap unsur mata anggaran yang diserap untuk kepentingan desa dapat menjadi standar tolok ukur keberhasilan kinerja aparat. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dana desa diupayakan mampu menggambarkan sasaran yang dicapai sebagai kinerja yang cukup jelas (Sischa, 2020).

Kejelasan dari sasaran penggunaan anggaran memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pengelola dana desa, karena semakin jelas tujuannya, semakin optimal pula kinerja aparatur dalam mengelola anggaran (Dwipayani & Hutnaleontina, 2022). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan dana desa (Dewi & Erlinawati, 2020). Sasaran penggunaan anggaran yang jelas membantu aparatur dalam menyusun mata anggaran yang sesuai dengan target pencapaian, sehingga setiap tahapan perencanaan dan implementasi anggaran menjadi lebih terarah (Wuriasih et al., 2022). Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran dana desa akan memudahkan aparatur dalam mencapai semua tujuan yang diharapkan (Syarif et al., 2022). Kejelasan tujuan

anggaran juga terbukti positif berpengaruh terhadap kinerja aparatur pengelola dana desa, karena tingkat kejelasan tujuan sasaran dari anggaran, memperlihatkan efektivitas dalam mengelola dana secara keseluruhan (Andirfa et al., 2023).

H₃ Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pengelola dana desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup 12 desa di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT. Teknik pengambilan sampel berasal dari warga yang berusia 20 tahun ke atas, dan terlibat dalam proses penyusunan anggaran desa. Sampel penelitian sebanyak 103 responden, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert yaitu dengan kriteria 1 sd 7. Tabel 1 merupakan uraian dalam definisi yang menjadi indikator penelitian.

Tabel 1. Indikator Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator
1.	Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa	Produktivitas, kualitas layanan, tanggung jawab, responsivitas, akuntabilitas
2.	Partisipasi Anggaran	Ikut serta menyusun anggaran, besar peran dalam menentukan ketetapan anggaran, kebutuhan dalam memberi saran pendapat.
3.	Evaluasi Anggaran	Penyerapan anggaran, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, respons terhadap penyimpangan, serta peran anggaran dalam pengawasan dan efisiensi.
4.	Kejelasan Tujuan Anggaran	Tujuan dibuat secara spesifik Standar kinerja, rentang waktu, tujuan, tingkat kesulitan, dan koordinasi.

HASIL

Responden sesuai kriteria harus memiliki pemahaman mengenai kinerja dalam pengelolaan dana desa serta pengalaman dalam penyusunan anggaran dana desa. Dari total 103 kuesioner yang disebar, hanya 101 data yang diolah karena terdapat beberapa data yang rusak atau tidak dapat digunakan. Adapun rincian demografi responden ada di Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Prosentase
Gender		
Perempuan	80	67 %
Laki-Laki	21	33 %
Usia		
18–24 tahun	54	56 %
25–34 tahun	41	39 %
35–44 tahun	4	5 %
45 tahun keatas	2	1 %
Pendidikan Terakhir		
SMA/Sederajat	50	51 %
D3	7	6 %
S1	43	43 %
S2	1	1 %

Sumber: Data olah penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa responden dalam riset ini mayoritas perempuan. Responden dengan rentang usia 18–24 tahun mendominasi, dengan jumlah 56 orang atau 55,5% total responden. Hasil ini memperlihatkan bahwa aparatur pengelola dana desa dengan usia 18–24 tahun merupakan kelompok terbesar dalam penelitian ini. Hal ini berarti aparatur dalam

rentang usia tersebut dianggap mampu bertanggung jawab dan menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang telah diamanahkan. Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden merupakan lulusan SMA/ sederajat, yaitu 52 orang, atau 51%, diikuti oleh lulusan Sarjana yaitu 43 orang atau 43%. Temuan ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan aparatur pengelola dana desa yang tinggi, mampu mengoptimalkan kemampuan mengelola anggaran desa secara efektif dan transparan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat terlihat pada Tabel 4, dimana semua hipotesis dari penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 27. Pada Tabel 3 ditunjukkan nilai validitas data dan reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji data Valid dan Reliabel

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Cronbach Alpha
Partisipasi Anggaran	Langsung	.810	.1956	.857
	Tidak Langsung	.532	.1956	
	Penyusunan	.826	.1956	
	Pengelolaan	.828	.1956	
	Tanggungjawab	.870	.1956	
	Penilaian	.710	.1956	
Evaluasi Anggaran	Efisiensi	.816	.1956	.920
	Standar	.883	.1956	
	Efektif	.878	.1956	
	Alokasi	.841	.1956	
	Evaluasi	.876	.1956	
	Kebutuhan	.778	.1956	
Kejelasan Tujuan Anggaran	Spesifikasi	.879	.1956	.911
	Monitoring	.914	.1956	
	Efektif	.913	.1956	
	Penilaian	.850	.1956	
Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa	Penyusunan	.692	.1956	.919
	Tujuan	.775	.1956	
	Efektivitas	.844	.1956	
	Kebersamaan	.810	.1956	
	Responsif	.777	.1956	
	Aspirasi	.832	.1956	
	Ketepatan	.817	.1956	
	Evaluasi	.866	.1956	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 terlihat setiap indikator dari variabel penelitian ini semuanya validitasnya baik, karena nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai reliabilitas tersebut memiliki *cronbach alpha* melebihi 0,70 yang dihasilkan dari pengukuran variabel tersebut dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan. Pengujian one sample kolmogorov smirnov dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil memperlihatkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,063 lebih besar dari 0,05. Pada pengujian Multikolinieritas telah bebas dengan nilai tolerance dan VIF masing masing untuk Partisipasi anggaran (0,820 dan 1,219), Evaluasi anggaran (0,295 dan 3,291) dan Kejelasan tujuan anggaran (0,313 dan 3,197) telah berada sesuai dengan ketentuan. Dan demikian halnya untuk menguji tidak terjadi heteroskedasitas pada data yang diteliti, nilai pengujian *Gleyser* semua variabel sudah berada diatas 0,5 yaitu Partisipasi anggaran (0,284), Evaluasi anggaran (0,433) dan Kejelasan tujuan anggaran (0,182). Pengujian kelayakan model telah menunjukkan F hitung Anova sebesar 96,388 dan angka sig kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa

hasil uji signifikan sehingga model telah layak untuk menjelaskan hasil. Nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,741, yang berarti kinerja aparatur pengelola dana desa sebagai dependen dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai independen sebesar 74.1%.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	Coefficients	t	Sig	Kesimpulan
H ₁	Partisipasi Anggaran → Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa	0,250	4,153	0,000**	Diterima
H ₂	Evaluasi Anggaran → Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa	0,468	3,659	0,000**	Diterima
H ₃	Kejelasan Tujuan Anggaran → Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa	0,811	4,777	0,000**	Diterima
	*p < .05, **p < .001				

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4, H₁ H₂ dan H₃ diterima dan didukung hasil penelitian sebelumnya dengan nilai signifikansi berada lebih rendah dari 0,05 dan nilai t-hitung diatas 1,96. Persamaan model regresi linear penelitian ini:

$$KADD = 2.920 + 0.250 PA + 0.468 EA + 0.811 KA + e$$

Keterangan:

KADD : Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa;

PA : Partisipasi Anggaran

EA : Evaluasi Anggaran;

KTA : Kejelasan Tujuan Anggaran

PEMBAHASAN

Partisipasi Anggaran dan Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa

Hasil pada uji hipotesis pertama yaitu diterima, di mana partisipasi anggaran signifikan positif memengaruhi kinerja aparatur pengelola dana desa. Hasil temuan membuktikan banyaknya masyarakat yang turut terlibat dalam tahap menyusun dan mengelola anggaran, akan semakin optimal hasil yang dicapai dalam aspek pemerataan dan transparansi keuangan di desa. Hasil ini selaras dengan teori Stewardship yang menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mengatur anggaran desa sesuai dengan kepercayaan amanah yang diberikan. Aparatur desa tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pelayan publik yang berorientasi pada kepentingan bersama, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dapat terjaga dengan baik. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan terkait anggaran menjadi lebih inklusif, memungkinkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran serta mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Andirfa et al., 2023 ; Muhsin & Dwita 2022 ; Dewi et al., 2020 ; Fitriya et al., 2020 ; Santoso et al., 2022 ; Aghata et al., 2021 ; Rasmini et al., 2021 ; Aprilia et al., 2020 ; Setianingsih et al., 2022 ; Said et al., 2023 ; Robbani et al., 2024) yang juga menemukan bahwa partisipasi anggaran memiliki dampak positif terhadap kinerja aparatur pengelola dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin menguatkan pemahaman bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi anggaran menjadi faktor kunci dalam peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Evaluasi Anggaran dan Kinerja Aparatur Pengelola Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu diterima, yang berarti evaluasi anggaran positif memengaruhi signifikan kinerja aparat pengelola dana desa. Temuan ini membuktikan bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan tersistematis dan berkelanjutan mampu meningkatkan adanya

transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di desa. Hasil penelitian ini sesuai *stewardship theory*, yaitu menyatakan bahwa motivasi aparatur dalam melakukan evaluasi anggaran dengan baik akan mendorong peningkatan kinerja, sehingga tugas yang diamanahkan dapat dijalankan secara lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Evaluasi anggaran yang baik tidak hanya membantu mendeteksi penyimpangan dalam penggunaan dana, tetapi juga memberikan kesempatan bagi aparatur desa untuk memperbaiki serta menyempurnakan strategi pengelolaan anggaran guna mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, semakin baik proses evaluasi anggaran, semakin meningkat pula kualitas kinerja aparatur dalam mengelola dana desa. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh (Stieny et al., 2020 ; Annisa, 2024 ; Anton et al., 2023 ; Kusuma et al., 2021 ; Andirfa et al., 2023) yang sama-sama menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu, penerapan evaluasi anggaran yang efektif menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kejelasan Tujuan dari Anggaran dan Kinerja Aparatur dalam Pengelola Dana Desa

Hasil uji hipotesis tiga penelitian ini, diterima. Temuan ini membuktikan secara nyata bahwa tujuan anggaran yang sesuai memengaruhi positif signifikan pada kinerja aparatur dalam mengelola dana desa. Dengan adanya kejelasan tujuan dalam perencanaan anggaran, aparatur desa bekerja lebih efektif serta efisien dalam mengatur serta menyalurkan dana desa sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Hal ini seiring dengan teori *stewardship* yang menekankan layanan pemerintah, khususnya dalam penggunaan anggaran dana desa, harus sesuai pada peruntukan yang pernah direncanakan agar bermanfaat maksimal bagi masyarakat desa. Tingginya tingkat kejelasan penyusunan dan pelaksanaan dari anggaran, menggambarkan makin baik kinerja aparatur desa menjalankan tugasnya (Kikiana & Rahmadhani, 2024). Masyarakat pun akan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kinerja aparatur desa, karena pengelolaan dana yang transparan dan terarah mencerminkan akuntabilitas serta profesionalisme dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, kejelasan tujuan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam mengelola dana, tetapi juga sebagai elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hasil riset ini selaras dengan penelitian yang juga menemukan kejelasan tujuan anggaran signifikan berpengaruh pada kinerja aparatur pengelola dana desa. Studi yang dilakukan oleh (Dwipayani et al., 2022 ; Syarif et al., 2022 ; Syarif et al., 2022 ; Ermayani et al., 2024 ; Ali et al., 2024 ; Made et al., 2020 ; Rizki Wijaya et al., 2024 ; Wuriasih et al., 2022) menunjukkan hasil seiring, yaitu adanya kejelasan tujuan anggaran yang ditetapkan, dapat memperbaiki kinerja aparatur dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan pada penelitian Dewi & Erlinawati (2020) mendukung juga temuan ini, menguatkan bahwa kejelasan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran menjadi faktor yang berkontribusi langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur desa.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji dampak partisipasi anggaran, penilaian anggaran dan kejelasan tujuan anggaran pada kinerja peralatan manajemen dana desa di distrik Aesesa. Hasil analisis menunjukkan faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa. Kontribusi hasil penelitian ini, dapat digunakan memahami indikator penyusunan anggaran yang memengaruhi kinerja aparatur pengelola dana desa, khususnya dari aspek partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, dan adanya kejelasan tujuan dalam anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya partisipasi anggaran yang tinggi dapat mendorong keterlibatan secara aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga meningkatkan transparansi serta akuntabel dalam mengelola dana desa. Evaluasi anggaran yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan sekaligus membantu dalam perbaikan strategi pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, kejelasan tujuan anggaran berperan sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan

bukti empiris yang mendukung teori stewardship, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Adhivinna, V., Selawati, M., & Umam, M. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2):63–74. doi: 10.29303/jaa.v6i2.138.
- Paji, A., Herdi, H., & Salvanos, Y. Y. (2023). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kesokoja Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. *Student Research Journal*, 1(5).
- Afual, D., & Winarni, A. (2024). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten banyumas. *Ek&Bi*, 7:262–73. doi: 10.37600/ekbi.v7i1.1278.
- Andirfa, M. M., & Faisal, F. (2023). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran Dana Desa terdapat Kinerja Aparatur Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Nisam Antara). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1):155–68. doi: 10.33059/jensi.v7i1.7755.
- Anggraeni, P., & Dilla, P. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*, 266–84.
- Aprilya., & Restu, K. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3):1–20. doi: 10.33087/ekonomis.v8i2.1906.
- Arkadius, N. D. (2024). Diduga Ada Nama Fiktif Ganti Rugi Proyek Pembangunan Waduk Lambo - FloresPos Net. <https://florespos.net/2024/03/15/diduga-ada-nama-fiktif-ganti-rugi-proyek-pembangunan-waduk-lambo>.
- Aryani, N. P. D. E., Werastuti, D. N. S., & Adiputra, M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 11(2):178–90.
- Sososutiksno, C., & Basuki, F. H. (2021). Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Evaluasi ANgggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah (Studi Empiris di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku). *JAK: Jurnal Akuntansi*, 7(2):87–102.
- Dewi, N. W., & Purnama, K. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1):273–98. doi: 10.32795/hak.v1i1.778.
- Donaldson & Lex et al. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian journal of Management*, 16(June 1991):49–66.
- Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(1):28–47. doi: 10.32795/hak.v3i1.2281.
- Ermayani, I., Ifni, S., & Sarwani. (2024). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah , dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tapin. *Edunomics Journal*, 5(2):160–77.
- Ega, A., & Rahmadhani, S. (2024). Pengaruh Karakteristik UMKM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Self Efficacy Sebagai Pemoderasi *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1833-1845.
- Ika A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1):63–76. doi: 10.29303/akurasi.v2i1.15.

- Kikiana, M., & Rahmadhani, S. (2024). The Influence of the Background and Characteristics of the Chief Executive Officer on Company Performance. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 12(2), 127-146.
- Kusuma, I.C. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akunida* 7(2):217–30. doi: 10.30997/jakd.v7i2.4804.
- Layli, M., & Arifin, J. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Kemahiran Profesional Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 8(2):152. doi: 10.26486/jpsb.v8i2.1310.
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1):263–77. doi: 10.24036/jea.v5i1.729.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1):118–30.
- Muhsin, R. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1):150–64. doi: 10.24036/jea.v4i1.441.
- Murtin, A., & Rahmawati, S. I. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1):17–28. doi: 10.59330/jai.v1i1.3.
- Oki, H. (2024). YUME : Journal of Management Pengaruh Pelatihan , Sarana Prasarana dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Payakumbuh. 7(3):577–88.
- Pebriyanto, I. W. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(4):372–81. doi: 10.32795/hak.v2i4.2026.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3):1668–88.
- Rasmini, N. K., & Mimba, P. S. H. (2021). The influence of apparatus competence, leadership style, tri hita karana culture and society participation on the effectiveness of village fund management. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1):61–75. doi: 10.14414/tiar.v11i1.2046.
- Robbani, A. A., Ferina, I. S., & Kartasari, F. S. (2024). Pengaruh Logika Institusi , Indikator Kinerja Utama , dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Institusional, 8(April):1394–1403.
- Safrina. (2025). *Kasus Korupsi di Aceh pada tahun 2024 Didominasi Dana Desa*.
- Hasanuddin, A. N. T., Haliah., & Said, D. (2023). Pengaruh Ideologi Etik dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Hubungan Antara Partisipasi dan Senjangan Anggaran. *Owner*, 7(1):787–98. doi: 10.33395/owner.v7i1.1221.
- Santoso, A., Nugroho, A. S., & Ma'ruf, M. H. (2022). Peningkatan Kinerja Manajerial berbasis Anggaran Partisipasi. *Owner*, 6(2):1385–97. doi: 10.33395/owner.v6i2.759.
- Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K., & Putrianti, E. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat. *Owner*, 6(4):3860–69. doi: 10.33395/owner.v6i4.1127.
- Putri, S. S. E. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sdm Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2):92. doi: 10.24014/jel.v10i2.8436.
- Solehah, S., Hidayah, N., & Layli, M. (2023). Pengaruh Etika Profesi, Independensi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Auditor pada Kantor BPKPAD Bantul. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(01):64–76. doi:

10.37366/akubis.v8i01.784.

- Zainab. (2020). Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa. 241–54.
- Sulistiyowati, R., Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi. *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2):1798–1811.
- Syarif, F. J., Suwadi, M., & Sari, N. R. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1):133–51. doi: 10.24252/isafir.v3i1.29262.
- Sirande, G. M., Wuriasih, A., Werimon, S., & Malino. M. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari). *Lensa Ekonomi*, 16(01):16. doi: 10.30862/lensa.v16i01.210.